UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Dialektika Kebijakan: Antara Kepatuhan pada Nalar Pasar dan Swadaya Budaya Desa Giyanti
Tina Aiyra Faradiba, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa *governance* adalah keniscayaan dialektik: tata kelola publik hanya bekerja ketika pihak-pihak dengan kepentingan berbeda–dalam hal ini, negara dan warga–duduk setara untuk bernegosiasi. Dengan menjadikan Desa Wisata Budaya Giyanti di Kabupaten Wonosobo sebagai studi kasus, penelitian ini menganalisis dialektika yang tidak dikelola antara logika pasar-administratif yang dibawa negara dan logika budaya-swadaya yang dijalankan warga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan desain eksplanatif-kritis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci di tingkat kabupaten dan desa, termasuk informan yang merepresentasikan posisi pro, kontra, dan netral terhadap desa wisata, serta melalui analisis dokumen kebijakan (Perbup No. 29 Tahun 2018, Perbup No. 76 Tahun 2020, dan Keputusan Bupati No. 556/573/2020). Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dialektika yang tidak dikelola termanifestasi dalam tiga tataran. *Pertama*, pada tataran desain kebijakan, terjadi *strategic selectivity* (Jessop, 2002): kebijakan lebih mengutamakan indikator terukur (PAD dan jumlah kunjungan) daripada perlindungan nilai sakral dan keberlanjutan budaya. Perbup No. 76 Tahun 2020 mendorong komodifikasi budaya (“paket wisata yang layak jual”) tanpa menyediakan mekanisme perlindungan nilai sakral; Pasal 47 hanya

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Dialektika Kebijakan: Antara Kepatuhan pada Nalar Pasar dan Swadaya Budaya Desa Giyanti
Tina Aiyra Faradiba, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

memberi warga hak untuk "mengetahui", bukan hak untuk memutuskan; dan struktur kelembagaan dalam Perbup No. 29 Tahun 2018 menempatkan kebudayaan sebagai subordinat pariwisata. *Kedua*, pada tataran praktik di tingkat tapak, muncul fenomena yang penulis sebut sebagai "wisata pura-pura budaya": ritual sakral Tenongan dikomodifikasi sehingga dapat digeser dan diulang kapan saja, seleksi budaya dipersempit pada kesenian yang "layak jual", partisipasi warga direduksi menjadi prosedural, dan relasi kuasa menjadi timpang. Dalam kerangka Mouffe (2005), ini merupakan *post-politics*: antagonisme yang inheren tidak dimediasi secara agonistik, melainkan ditekan melalui prosedur. *Ketiga*, di tengah krisis dialektika tersebut, penelitian ini menemukan tiga praktik dialektik warga yang berjalan otonom dan justru lebih mampu memediasi kontradiksi pasar-budaya: *homestay* sebagai tempat berbagi kehidupan, Wisuda Lengger yang mempertahankan nilai spiritual *Elingo Ngger*, dan toleransi antarumat beragama yang terjadwal. Dalam kerangka Jessop, praktik-praktik ini mencerminkan *heterarchy*; dalam kerangka Mouffe, ini mencerminkan agonisme–warga menegosiasikan logika pasar dan logika budaya tanpa menekan salah satunya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di Giyanti bukanlah kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan mengelola *governance* sebagai dialektika. Negara tidak mampu membaca budaya sebagai medium politik sehingga tidak pernah duduk setara dengan warga. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dialektika sulit diwujudkan, tetapi justru dari pengakuan atas kesulitan tersebut, dialektika dapat dipraktikkan melalui negosiasi, pengakuan atas pengetahuan lokal, dan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Dialektika Kebijakan: Antara Kepatuhan pada Nalar Pasar dan Swadaya Budaya Desa Giyanti
Tina Aiyra Faradiba, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pemberian ruang bagi warga untuk menentukan makna budayanya. Dialektika tidak menawarkan solusi final; ia menawarkan praktik berkelanjutan untuk terus mengelola ketegangan. Praktik inilah yang dimaksud dengan mengelola *governance* sebagai dialektika: bukan mencapai titik akhir, melainkan terus mengelola ketegangan. Perbaikan tata kelola tidak cukup dilakukan dengan menambah prosedur; diperlukan redesain relasi dari hierarki menuju *heterarchy* (Jessop) dan dari *post-politics* menuju agonisme (Mouffe). Pelajaran dari Giyanti adalah bahwa memuliakan desa–mengakui, melindungi, dan memberdayakan kearifan lokal–bukanlah tindakan sentimental, melainkan strategi *governance* yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Kata kunci: dialektika kebijakan, *governance* sebagai dialektika, *strategic selectivity*, *post-politics*, *heterarchy*, agonisme, budaya sebagai relasi kuasa, Desa Wisata Budaya Giyanti.